

ABSTRAK

Ryan Raditya, 271 409 165, Implementasi Pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 1999 Mengenai Pers Sebagai Media Kontrol Sosial Dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal (Dibimbing Oleh Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH, selaku Pembimbing I dan Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, MH, selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar peran pers serta kiat-kiat pers dalam mengimplementasikan fungsi kontrol sosialnya sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3 No. 40 tahun 1999 mengenai pers, juga untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang diperoleh oleh pers dalam menerapkan fungsi kontrol sosialnya terhadap pelaksanaan demokrasi lokal di Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan Yudiris-Sosiologis, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen yang merupakan langkah awal dalam sebuah penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dengan menggunakan sistem wawancara yaitu memberikan beberapa pertanyaan kepada para responden yang terkait, diantaranya pimpinan redaksi serta para wartawan di Gorontalo Post, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat serta para Akademisi di Gorontalo, dan diolah dengan metode analisis dan deskriptif analisis.

Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian *pertama* Peranan yang dilakukan kaum jurnalis di Gorontalo dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya belumlah sempurna ataupun semaksimal apa yang menjadi tujuan maupun cita-cita dari dibentuknya pers itu sendiri. Namun usaha kaum jurnalis untuk terus bertanggung jawab secara moral maupun kode etik dalam mengawal kebijakan ataupun implementasi dari pelaksanaan demokrasi lokal itu sendiri guna mewujudkan media massa yang faktual, aktual dan independen patut diberikan pujian tersendiri. *Kedua*, Masalah intervensi dan kurangnya keberagaman media cetak masih menjadi kendala besar terhadap kinerja kaum pers maupun instansi-instansi yang menjadikan media cetak sebagai sumber datanya yang kemudian memunculkan pendapat bahwa Pers di Gorontalo masih terlalu terkekang oleh kepentingan para penguasa ataupun pemerintah. Produk pers sendiri masih jauh dari kata sempurna dalam mewujudkan surat kabar yang informatif serta inspiratif.

KATA KUNCI: *Demokrasi Lokal, Jurnalis, Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999*